

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada Mei 2022, Kota Bekasi menjadi pusat perhatian publik karena kebijakan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang diumumkan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Kebijakan ini mencakup pejabat eselon III dan IV yang berperan penting dalam administrasi kota.

Kontroversi dimulai pada 10 Mei 2022 ketika rencana rotasi dan mutasi pejabat ini diumumkan. Rencana ini memicu kritik dari sejumlah elemen masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Pemberitaan ini mencerminkan bahwa ada ketidakpuasan dan ketidaksetujuan yang cukup signifikan terhadap kebijakan tersebut. Pada 12 Mei 2022, daftar nama-nama pejabat eselon III dan IV yang akan dipindahkan menjadi sorotan DPRD Kota Bekasi. Kritik yang muncul adalah bahwa penempatan pejabat-pejabat ini tidak sesuai dengan bidang keilmuan mereka, yang dapat memengaruhi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ([transparannews.id](http://transparannews.id) diakses pada 22 September 2023 pukul 23.00 WIB). Namun pada 19 Mei 2022 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat izin yang memungkinkan PLT Wali Kota Bekasi untuk melaksanakan rotasi dan mutasi 72 pejabat. Hal ini mengakhiri ketidakpastian dan memungkinkan pelantikan 72 pejabat tersebut di Gedung Pemkot Bekasi. ([radarbekasi.id](http://radarbekasi.id) diakses pada 22 September 2023 pukul 23.17 WIB).

Rotasi dan mutasi pejabat ini memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Ada pihak yang mendukung kebijakan ini, namun juga ada yang mempertanyakan motif di balik keputusan ini. Kejanggalan dalam pelaksanaan rotasi dan mutasi ini menjadi perdebatan, dan publik mencari pemahaman lebih lanjut tentang tujuan sebenarnya di balik kebijakan ini. Salah satu aspek yang mencuat dalam latar belakang masalah ini adalah

spekulasi tentang motif politis di balik kebijakan rotasi dan mutasi. Beberapa pandangan muncul yang mengindikasikan bahwa keputusan ini mungkin terkait dengan kepentingan politis dari PLT Wali Kota Bekasi (transparannews.id diakses pada 22 September 2023 pukul 23.00 WIB).

Kebijakan pemutasian pejabat di Kota Bekasi yang diambil oleh Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Walikota Bekasi telah menjadi sorotan utama dalam pemberitaan dan menjadi sumber ketegangan. Pemutasian ini melibatkan pejabat eselon di dalam Pemerintah Kota Bekasi. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bernama Nicodemus Godjang pada 14 Mei 2022 mengeluarkan kritik terhadap kebijakan pemutasian tersebut. Dia menyatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh PLT Walikota Bekasi dinilai ilegal, dan ini menciptakan kontroversi di lingkungan pemerintahan. Nicodemus Godjang merujuk pada berbagai undang-undang dan surat edaran, seperti Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII/2019. Menurutnya, PLT Walikota memiliki kewenangan yang terbatas, terutama dalam keputusan dan tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum dalam aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran (transparannews.id diakses pada 22 September 2023 pukul 23.47 WIB).

Pada 23 Mei 2022 PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan Partai Gelora memberikan dukungan terhadap kebijakan rotasi dan mutasi yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Walikota Tri Ardianto. Dalam dukungan mereka, mereka menganggap bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari dinamika tata-laksana di dalam pemerintahan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ariyanto Hendrata, Ketua DPD Partai Gelora Kota Bekasi, menekankan bahwa rotasi dan mutasi pejabat adalah hak prerogatif seorang kepala daerah yang telah melalui proses sesuai aturan. Dalam pandangannya, kebijakan ini harus dihormati sebagai bagian dari tugas seorang kepala daerah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas organisasi

pemerintah kota. Sedangkan Sekretaris DPC PKB Kota Bekasi, Alit Jalaluddin, menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan adalah bagian biasa dari tata kelola pemerintahan. Dalam pandangannya, selama aturan dalam proses mutasi dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Plt Kepala Daerah/Walikota memiliki wewenang untuk melaksanakannya sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat (radarbekasi.id diakses pada 23 September 2023 pukul 00.26 WIB).

Dalam era digital dan perkembangan teknologi informasi, jumlah media online di berbagai daerah, termasuk Kota Bekasi, semakin meningkat pesat. Namun, dalam rangka menganalisis framing (pola penekanan) berita tertentu, perlu dipilih media yang memiliki pengaruh besar dalam pemberitaan tersebut. Dalam konteks ini, Transparannews.id dan Radarbekasi.id dipilih karena keduanya memiliki jumlah pemirsa atau viewers yang signifikan dibandingkan dengan media online lainnya di Kota Bekasi.

Kehadiran Transparannews.id dan Radarbekasi.id yang mendominasi dalam pemberitaan mengenai kebijakan rotasi dan mutasi pejabat yang dilakukan oleh Plt Walikota Bekasi menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Bekasi banyak mengandalkan kedua media ini sebagai sumber informasi utama. Kepopuleran keduanya membuat laporan mengenai peristiwa ini menjadi sorotan utama dan menjadi topik yang hangat diperbincangkan.

Pemberitaan yang dilakukan oleh Transparannews.id dan Radarbekasi.id terkait kebijakan rotasi dan mutasi pejabat ini dapat digambarkan sebagai "massive" atau sangat besar dalam skala liputannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya peristiwa tersebut dalam konteks Kota Bekasi. Seiring dengan besarnya perhatian media, isu ini menjadi sebuah laporan utama yang banyak diminati oleh masyarakat.

Namun, penting untuk diingat bahwa media online, termasuk Transparannews.id dan Radarbekasi.id, memiliki sudut pandang dan

ideologi yang mendasari pemberitaannya. Konsep framing mengacu pada cara media memilih dan mengolah berita sesuai dengan perspektif dan nilai-nilai yang mereka anut. Oleh karena itu, walaupun kedua media ini melaporkan peristiwa yang sama, mereka mungkin menekankan aspek-aspek yang berbeda atau memandang peristiwa tersebut dari sudut pandang yang berbeda.

Konten media merupakan perang pena dari ideologi, kepentingan sosial-ekonomi, tradisi media dan kemampuan kinerja dari para pekerja media. Artinya kompleksitas formulasi isi media tidak dapat disederhanakan dengan hanya melihat pengaruh dari konten media. Setiap media mempunyai nilai atau ideologi yang mereka anut. Secara positif nilai atau ideologi diinterpretasikan sebagai suatu pandangan global yang menyatakan mazhab suatu kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka, sedangkan secara negatif, ideologi dapat dinilai sebagai suatu kesadaran palsu, yaitu suatu keinginan untuk melakukan penipuan menggunakan cara merubah pandangan orang terkait realitas sosial (Sobur 2018).

Dengan demikian, pemilihan [Transparannews.id](http://Transparannews.id) dan [Radarbekasi.id](http://Radarbekasi.id) sebagai bahan analisis framing mencerminkan pengakuan akan peran penting media dalam membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap suatu peristiwa. Melalui analisis framing, dapat dilihat bagaimana kedua media ini memandang dan menginterpretasikan kebijakan rotasi dan mutasi pejabat tersebut, serta bagaimana hal ini memengaruhi pandangan masyarakat tentang isu tersebut.

Shoemaker dan Reese (1996) dalam Nugraha, Pratiwi P. (2022) telah mengemukakan bahwa terdapat dua aspek yang memengaruhi media, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal melibatkan karakteristik individu pekerja media dan rutinitas yang berlaku di dalam organisasi media, seperti rutinitas dalam produksi berita. Faktor eksternal media, di sisi

lain, mencakup variabel di luar media itu sendiri, seperti pengaruh dari faktor ekstramedia dan ideologi yang memengaruhi konten media.

Dalam kerangka pandangan tersebut, McQuail (1987) juga menyatakan bahwa proses produksi media dalam sebuah organisasi media berlangsung dalam lingkungan yang ditandai oleh tingginya tingkat tekanan dan tuntutan yang kadang-kadang bertentangan. Tekanan ini dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemilik media, pemegang saham, pengiklan, mitra kelompok sosial politik, serta pemerintah yang sedang berkuasa (Nasrullah, 2014: 41-42).

Dengan demikian, proses penciptaan atau penulisan berita bukanlah suatu hal yang bersifat netral. Sebaliknya, suatu peristiwa atau kenyataan dianggap sebagai hasil dari upaya jurnalis (Arifin, 2011: 165). Pembuatan berita ini seakan menjadi sebuah kekuatan yang dimiliki oleh media massa, yang bertujuan untuk membentuk dan menggambarkan citra serta pandangan tertentu kepada masyarakat umum.

Hal ini sesuai dengan liputan yang dilakukan oleh situs berita online seperti [transparannews.id](http://transparannews.id) dan [radarbekasi.id](http://radarbekasi.id). Media-media ini memiliki sudut pandang khusus terkait Kebijakan rotasi dan mutasi pejabat di pemerintah kota Bekasi. Dalam setiap proses penyusunan berita, terdapat bias ideologi yang bisa disengaja atau tidak disengaja oleh para wartawan. Karena hal ini, Media tidak terlepas dari pengaruh dan kepentingan media itu sendiri. Kepentingan tersebut bersaing dibalik isu yang ada sehingga membuat media cenderung bersifat subjektif dan tidak netral dalam menyajikan suatu peristiwa kedalam bentuk berita (Yuliarti et al. 2017).

Berdasarkan peristiwa yang sama, yakni mengenai kebijakan rotasi dan mutasi pejabat di pemerintah kota Bekasi, perspektif konstruktivis menyatakan bahwa dalam proses peliputan suatu peristiwa oleh media, terjadi seleksi informasi atau isu, di mana beberapa aspek sengaja ditekankan sementara yang lain sengaja diabaikan atau bahkan dihilangkan. Hal ini menunjukkan bahwa di balik klaim objektivitas dan independensi



yang sering diutarakan oleh media dan jurnalis, sebenarnya terdapat bias dan kecenderungan tertentu. Karena alasan ini, kerangka pemberitaan mengenai kebijakan rotasi dan mutasi pejabat di pemerintah kota Bekasi dapat berbeda dalam sudut pandang media online, meskipun topik yang sama diangkat.

Berdasarkan peristiwa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mendalami lebih lanjut karakteristik peliputan media massa berbasis online atau internet, seperti [transparannews.id](http://transparannews.id) dan [radarbekasi.id](http://radarbekasi.id), terkait kebijakan rotasi dan mutasi pejabat di pemerintah kota Bekasi. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk memahami bagaimana media-media tersebut membingkai berita tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode analisis framing dengan model yang diajukan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Pan dan Kosicki mengartikan framing sebagai sebuah proses di mana pesan atau informasi tertentu diberikan penekanan lebih, ditempatkan lebih menonjol daripada informasi lainnya, dengan tujuan agar audiens lebih fokus pada pesan tersebut (Eriyanto, 2002 dalam Puspitasari, K. 2020) . Dalam konteks analisis berita yang terkait dengan rotasi dan mutasi pejabat pemerintah Kota Bekasi, empat dimensi struktural dalam teks berita akan digunakan sebagai alat framing. Dimensi-dimensi ini mencakup struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik.

Berikut salah satu isi pemberitaan Rotasi dan Mutasi Pejabat Pemerintah Kota Bekasi yang di rilis oleh media [transparannews.id](http://transparannews.id) dan media [radarbekasi](http://radarbekasi.id).



Gambar 1.1 Contoh Berita Pada Media Transparannews.id (Sumber : <https://www.transparannews.id/berita/soal-mutasi-pejabat-pemkot-faisal-se-kinerja-bkpsdm-sangat-mengecewakan/>)



Gambar 1.2 Contoh Berita Pada Media Radarbekasi.id (Sumber : <https://radarbekasi.id/2022/08/19/mutasi-tri-ingatkan-pejabat-tak-korup/>)

Meskipun media online menjadi tempat favorit dalam mencari berita dengan banyak kelebihannya, tetapi bisa jadi semua berita tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta atau mungkin justru media online menjadi perantara paling kuat untuk melakukan framing terhadap suatu berita. Karena media online juga dapat menjadi wadah untuk pencitraan atau menjadi perantara untuk mengkritik satu sama lain, hal tersebut yang menjadikan media online dapat melakukan pembingkai atau framing terhadap suatu peristiwa. Fakta-fakta yang terjadi dilapangan belum tentu diberitakan semuanya kepada 8utase, maka banyak hal yang harus diperhatikan dalam setiap berita yang disajikan oleh media online, karena tulisan di sebuah berita dapat menggiring opini masyarakat akan hal yang terjadi, sehingga mampu menumpulkan pemikiran kritis masyarakat yang mengkonsumsinya.

Dalam menganalisis framing tentunya dibutuhkan media pembanding. Penulis memilih media online [Transparannews.id](http://Transparannews.id) dan [Radarbekasi.id](http://Radarbekasi.id). Jika dilihat dari berita-berita yang memuat di dua media tersebut, penulis melihat adanya kecenderungan di salah satu media yang membingkai berita tersebut. Maka dari situlah penulis ingin melihat sejauh mana pembingkai berita tersebut dimuat oleh wartawan.

Berita yang akan penulis teliti adalah pemberitaan yang memuat tentang rotasi dan 8utase pejabat pemerintah kota Bekasi oleh PLT Walikota Bekasi karena berita tersebut merupakan berita penting yang harus diketahui kebenarannya. Selain berita rotasi mutase tersebut terkait dengan kepentingan masyarakat. Penulis juga melihat bagaimana media memuat berita sesuai fakta peristiwa dilapangan.

Urgensi pada penelitian ini mengenai pemberitaan kinerja dari Pemerintah Kota Bekasi atas Rotasi dan Mutasi yang dijalankan secara berkala, hal tersebut dinilai oleh beberapa masyarakat bahwa kebijakan rotasi dan mutasi bisa saja mengandung unsur politis di dalamnya dan ada juga beberapa masyarakat yang mendukung jika rotasi dan mutase ini di



nilai untuk kepentingan atau kelancaran proses administrasi dan lainnya pada tubuh pemerintah Kota Bekasi.

Agar memberikan informasi yang benar dan cepat terhadap masyarakat maka media atau pers dituntut untuk bisa menambah pengetahuan pembacanya dengan menyajikan informasi atau berita yang berdasarkan fakta dari suatu peristiwa.

Dari penjelasan di atas penulis dapat mengangkat judul skripsi “Analisis Framing Pemberitaan Rotasi dan Mutasi Pejabat Pemerintah Kota Bekasi”. Hal tersebut yang menimbulkan pro dan kontra terhadap masyarakat Kota Bekasi.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana media online [Transparannews.id](http://Transparannews.id) dan [Radarbekasi.id](http://Radarbekasi.id) mbingkai pemberitaan polemik kebijakan rotasi dan mutasi pejabat pemerintah Kota Bekasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing pemberitaan oleh [Transparannews.id](http://Transparannews.id) dan [Radarbekasi.id](http://Radarbekasi.id) terkait kebijakan rotasi dan mutasi pejabat pemerintah Kota Bekasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dalam penelitian ini, antara lain :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pemahaman tentang peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Hasil analisis framing dari media online [Transparannews.id](http://Transparannews.id) dan [Radarbekasi.id](http://Radarbekasi.id) dapat memberikan wawasan tentang bagaimana media memengaruhi cara masyarakat memahami kebijakan pemerintah, serta bagaimana media mengkonstruksi narasi terkait isu-isu politik dan administratif. Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang media, framing, dan pengaruh media terhadap opini publik.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang signifikan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana media memengaruhi persepsi masyarakat, pemerintah Kota Bekasi dan lembaga terkait dapat mengambil tindakan yang lebih tepat dalam berkomunikasi dengan publiknya. Mereka dapat mengadopsi strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menjelaskan kebijakan rotasi dan mutasi pejabat, serta mengelola isu-isu polemik dengan lebih baik. Selain itu, media itu sendiri dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merefleksikan peran mereka dalam membentuk opini publik dan dapat berusaha untuk menyajikan berita yang lebih seimbang dan objektif.

